

**PENGEMBANGAN SENTRA PENERAJIN AKAR BAMBU DI DESA JAMBU
KULON KLATEN JAWA TENGAH**

Oktaviani Wince Awuy, Teguh Budi Prasetya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Korespondensi penulis: octha.ocey07@gmail.com, teguhbudiprasetya@gmail.com

Abstrak

Strategi Pengembangan Pengelolaan Sentra Pengrajin Akar Bambu Di Desa jambu Kulon Klaten Jawa Tengah. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Kabupaten Klaten memiliki kewenangan dalam mengelola potensi daerahnya. Salah satunya pemberdayaan Industri Akar Bambu Di Desa Jambu Kulon Kabupaten Klaten. Penelitian ini ingin mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sentra industri akar bambu di Desa Jambu Kulon Kec. Ceper Kab. Klaten, yang dimana masih ditemui beberapa kendala.

Dalam penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan data yang diambil adalah dari hasil observasi di Desa Jambu Kulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, interview dengan beberapa sumber , dan dokumentasi serta fotofoto, serta juga menambahkan beberapa referensi dari majalah, buku, literatur, dan juga dari sumber internet atau website.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Klaten khususnya Dinas Perindustrian Kabupaten Klaten, telah melaksanakan strategistrategi dalam pemberdayaan IKM di Sentra Industri Akar Bambu di Desa Jambu Kulon Kabupaten Klaten. Strategi-strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, antara lain 1. Dinas Perindustrian: a) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial, b) Pengembangan Pemasaran, c) Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2. Dinas Perdagangan: a) Pemberdayaan UKM, b) Pembinaan dan Pengembangan Usaha, c) Fasilitasi Penjamin Modal.

Kata kunci: pemerintah desa, strategi, pemberdayaan, pariwisata dan partisipasi.

Abstract

Development Strategy for the Management of Bamboo Root Craftsman Centers in the Jambu Kulon Village in Klaten, Central Java. According to Undang-Undang No. 23 tahun 2014 concerning Regional Government is one of the juridical foundations for the development of regional autonomy in Indonesia. Klaten Regency has the authority to manage the potential of its area. One of them is the empowerment of the Bamboo Root Industry in Jambu Kulon Village, Klaten Regency. This study wants to describe and analyze how the local government strategy in developing the bamboo root industry center in Jambu Kulon Village, Kec. Ceper Kab. Klaten, which is still encountered several obstacles.

In the study using descriptive qualitative research with data taken from observations in Jambu Kulon Village, Ceper District, Klaten Regency, interviews with several sources, documentation and photographs, as well as adding some references from magazines, books, literatures, and also from internet or website sources.

The results of the research show that the government of Klaten Regency, especially Dinas Industri of Klaten Regency, has implemented strategies in empowering IKM at the Bamboo Root Industry Center in Jambu Kulon Village, Klaten Regency. Strategies undertaken by the District Government of Klaten include, among others 1. Dinas Industri: a) Strategies for Increasing Financial Capability, b) Marketing Development, c) Human Resources Development. 2. Dinas Perdagangan: a) Empowerment of IKM b) Business Development and Development, c) Facilitation of Capital Guarantor.

Keywords: *village government, strategy, empowerment, tourism and participation.*

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Industri kerajinan akar bambu adalah salah satu industri mikro yang bergerak di bidang kerajinan yang mendukung sektor

wisata. Selain industri mikro sektor wisata juga menjadi sektor alternatif yang tidak begitu mengalami dampak dalam krisis ekonomi. Sektor ini dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan pendapatan baik bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Oleh karena itu setiap daerah yang memiliki potensi wisata berusaha mengoptimalkan sektor tersebut. Untuk mengembangkan sektor wisata sehingga menjadi suatu industri pariwisata yang memadai memerlukan perhatian dari berbagai pihak diantaranya pemerintah dengan kebijakannya, pihak swasta dengan modal dan investasinya, masyarakat dengan peran sertanya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan serta budaya. Industri pariwisata adalah suatu bisnis yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan.

Mengacu pada pengertian industri pariwisata diatas maka dapat disimpulkan bahwa industri pariwisata tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan unsur-unsur pendukung lainnya yang dapat membantu kelangsungan industri tersebut. Unsur-unsur yang dapat mendukung industri pariwisata adalah transportasi, komunikasi, informasi, akomodasi dan lain-lain. Unsur-unsur ini merupakan unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Keberhasilan suatu industri

akan tergantung pada tersedianya unsur-unsur tersebut.

Melihat kenyataan di lapangan bahwa usaha kecil dan menengah di Klaten sangat berpotensi, maka diselenggarakan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan untuk menjaga kelestariannya jangan sampai mati. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ceper dikarenakan Kecamatan Ceper merupakan sentra industri akar bambu yang berada di Kabupaten Klaten. Penelitian difokuskan pada usaha kecil dan menengah akar bambu dengan alasan hasil pra survey yang peneliti lakukan yang menemukan bahwa usaha kecil dan menengah akar bambu secara penjualan mendapatkan hasil jual yang maksimal sehingga perlu untuk diperhatikan bagaimana mendapatkan pembinaan dan pengembangan baik dari pemerintah maupun swasta paling tidak dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dalam menganalisa permasalahan penulis membatasi masalah mengenai upaya pengeolaan suatu sentra industri kerajinan, serta upaya peningkatan nilai seni serta upaya yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi atau pendapatan. Peningkatan merupakan sebuah proses perbuatan, cara meningkatkan usaha, kegiatan dan sebagainya (Poerwadarminta, 1988 : 951).

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun beberapa hal yang menjadi perumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sentra industri akar bambu di Desa Jambu Kulon Kec Ceper Kab Klaten?”

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi pembinaan industri tersebut?
2. Mengetahui sejauh mana pencapaian kebijakan pemerintah dalam mengembangkan industri tersebut?

Dengan adanya penelitian dan penulisan jurnal ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yang meliputi :

1. Manfaat Bagi Masyarakat
Menambah wawasan bagi masyarakat Desa Jambu Kulon tentang pengelolaan pengembangan wisata unggulan di Kabupaten Klaten

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah daerah setempat terutama Pemerintah Desa Jambu Kulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dalam mengambil kebijakan khususnya dalam pengelolaan industri kecil unggulan dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya

B. Bahan Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Strategi pengembangan pengelolaan sentra pengrajin akar bambu di Desa Jambu Kulon Klaten Jawa Tengah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah :

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat

dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah di terapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengertian strategi adalah hal-hal yang perusahaan ingin lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tertentu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (Saputra, 2015: 173).

Pariwisata merupakan kegiatan yang dapat dipahami dari banyak pendekatan. Dalam undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata di jelaskan bahwa :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan

oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
7. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pengelolaan pariwisata haruslah mengaju pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan

komunitas lokal. Menurut Cox (1985, dalam Dowling dan Fennel, 2003: 2), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special localsense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan pada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.

Pemberdayaan masyarakat menurut beberapa ahli seperti Adimihardja (1999), Hadilatih (2016), telah dimengerti sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. (Sunaryo, 2013: 215).

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah

pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental, emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang masuk diuji dengan teknik triangulasi. analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016 : 9)

C. Pembahasan

Komitmen terhadap Pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Klaten terlihat dari setiap programnya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menonjolkan sektor industri wisata yang lebih didominasi dengan adanya industri kecil dan menengah yang sesuai dengan RPJMD (

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. (*Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang " Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 "*).

C.1 Pengembangan Industri Kecil Menengah Di Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan daerah industri dan Perdagangan yang memiliki potensi sumberdaya yang besar, baik di bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK), Industri Logam Kimia dan Aneka (ILKA) serta usaha Perdagangan dan jasa.

Kebijakan pembangunan IKM di kab Klaten, tidak saja hanya diperuntukkan bagi peningkatan produksi dan produktivitas, tetapi lebih jauh diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat/pelaku usaha serta nilai tambah ekonomi melalui pemebdayaan IKM dan keterpaduan pengelolaan usaha baik dari pra produksi, produksi sampai dengan pasca produksi.

C.2 Visi Pengembangan IKM

Pengembangan IKM diorientasikan kepada visi agar menjelang tahun 2020 terwujud dapat IKM yang berbasis ekonomi kerakyatan yang maju, kompetitif, mandiri dan berperan secara berarti sebagai basis dan salah satu motor penggerak bagi pengembangan sektor industri secara keseluruhan.

C.3 Misi Pengembangan IKM.

Memperluas lapangan kerja melalui penciptaan dan pengembangan lapangan kerja, berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat luas secara lebih merata, menyebarkan kegiatan pembangunan dengan seoptimal mungkin mendayagunakan sumber daya dalam negeri (*indigeneous resources*) secara efisien dalam rangka pendalaman struktur industri atas prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan ekspor, serta menjadikan IKM sebagai wahana bagi pelestarian dan pengembangan seni budaya bangsa.

C.4 Tujuan Pengembangan IKM

1. Meningkatnya kesempatan berusaha kerja, dan pendapatan masyarakat secara lebih merata.
2. Terwujudnya struktur industri yang kuat.

3. Semakin banyaknya IKM yang berbasis pada hasil karya intelektual yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Meningkatnya persebaran IKM
Meningkatnya ekspor Produk IKM

5. Terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya.

C.5 Kebijakan Pengembangan IKM

1. Menggariskan prioritas sektoral pengembangan IKM melalui pemilihan jenis-jenis industri yang dijadikan lebih fokus pengembaangan untuk dijadikan acuan proiritas bagi aparat pembina secara terpadu atau lintas instansi, baik di pusat maupun di daerah, dimana pilihan jenis industri dan komoditi yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kecocokan potensi dan prospek tumbuh di daerah pengembangan.

2. Melakukan pemberdayaan agar para pelaku IKM:

- a) Mempunyai wawasan dan jiwa wirausaha yang ulet, patriotik, (cinta produk dalam negeri), profesional.

- b) Mampu mengidentifikasi, mengembangkan ataupun memanfaatkan peluang usaha.

- c) Mampu mengolah sumber daya produktif dan mengakses pasar baik lokal, dalam negeri maupun ekspor.
- d) Mempunyai kemampuan manajemen usaha, keahlian dan ketrampilan teknis atau teknologis.
- e) Mampu membangun daya saing yang berwawasan efisiensi, produktivitas dan mutu, proaktif, kreatif, inovatif.

C.6 Pokok-Pokok Program Pengembangan IKM

C.6.1 IKM Penggerak Ekonomi Daerah

IKM Penggerak Ekonomi Daerah adalah industri-industri yang mudah ditumbuh-kembangkan disuatu daerah, yang dapat menimbulkan dampak penggairahan ekonomi daerah secara cepat dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Sehingga dapat mempercepat peningkatan penghidupan atau kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah yang bersangkutan.

- a) Arahan dan Strategi Umum Pengembangan.

1. Pengembangan IKM penggerak Ekonomi Daerah diarahkan untuk dapat menjadikan kelompok industri ini salah satu dari dua tumpuan utama penghidupan masyarakat dimasing-masing daerah

2. Strategi pengembangan kelompok industri ini lebih ditentukan oleh faktor faktor dan kondisi lokal di tiap-tiap daerah pengembangan, baik dari segi potensi sumberdaya yang terdapat di daerah, peluang pasar maupun faktor kondisi masyarakat setempat.

C.6.2 Kebijakan Pembinaan IKM di Kabupaten Klaten

Pembangunan IKM termasuk industri kecil rumah tangga dan industri kerajinan adalah merupakan bagian integral dari pembangunan industri dan ekonomi Nasional mempunyai peranan yang sangat strategis.

Mengingat pentingnya peran kerajinan industri kecil rumah tangga dan kerajinan tersebut maka pemerintah senantiasa mengupayakan pembinaan dan pengembangan melalui berbagai kebijakan pembangunan yang bertujuan agar industri kecil mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi yang berkembang kearah yang lebih maju dan mandiri bahkan berkembang menjadi industri menengah sehingga semakin berperan dalam mengisi pembangunan.

C.7 Peranan IKM

Industri Kecil Menengah memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan, perluasan lapangan

kerja dan kesempatan berusaha, serta mengatasi kemiskinan. Industri kecil termasuk industri kerajinan dan rumah tangga, telah dibina dan di dorong perkembangannya terutama industri yang berorientasi pada pemanfaatan potensi sumberdaya alam serta tenaga kerja. Secara kumulatif jumlah unit usaha industri kecil di Kabupaten Klaten ada ± 35.000 unit usaha menyerap tenaga kerja ± Rp 1,7 triliun dan nilai produksi ± Rp 4,4 triliun pertahun.

C.8 Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengembangan IKM.

Ruang lingkup pembinaan diarahkan dan lebih diprioritaskan pada kelompok industri kecil yang menyentra yang berlokasi di seluruh wilayah Kabupaten Klaten, kemudian pada industri yang lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembinaannya dapat lebih efektif dan efisien.

C.9 Permasalahan atau Kendala dalam Pengembangan IKM

C.9.1 Sumber Daya Manusia

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap

manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Serta kualitas SDM yang masih rendah, daya inovasi dan kreativitas yang lemah, budaya cepat puas atas hasil yang telah didapatkan atau dicapai. Sikap disiplin dan etos kerja, serta profesionalisme rendah, dan penguasaan teknologi, skill masih rendah.

C.9.2 Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

C.9.3 Pemasaran

Pemasaran bagi UKM berkaitan erat dengan kurangnya peran asosiasi pengusaha

dan profesi dalam membantu sistem pemasaran produk, analisa pasar, lemahnya posisi usaha kecil dalam berhadapan dengan pengusaha besar serta kurangnya kemampuan usaha kecil dalam menyikapi kemauan konsumen yang selalu berkembang. Sampai saat ini masih banyak UKM yang terhambat pemasaran produknya. Sekalipun produk yang mereka hasilkan bagus, namun tak ada gunanya jika pemasaran tak memadai. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu UKM adalah dengan membantu memasarkan berbagai produknya dengan mengikutsertakan mereka dalam pameran.

C.9.4 Teknologi

Masalah dalam bidang teknologi produksi untuk menunjang efisiensi yang dihadapi oleh UKM berkaitan dengan kurang tersedianya tenaga terampil yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan. Kurangnya lembaga penelitian dan pengembangan (pemerintah dan non pemerintah) dalam menyebarkan informasi, melakukan pembinaan menemukan teknologi baru dan kajian teknologi tepat guna bagi usaha kecil serta kurangnya transfer teknologi pada waktu proses kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar. Permasalahan yang umum ditemui, banyak dari pelaku usaha masih enggan mengenal

teknologi internet untuk mengembangkan usahanya. Padahal pemanfaatan teknologi, informasi, dan jaringan internet semakin mudah dijangkau dan digunakan bahkan untuk orang awam sekalipun. Masyarakat Indonesia memiliki kreativitas yang beragam, hal itu sangat berpotensi membangun UKM yang memiliki daya saing tinggi. Hanya saja sebagian orang tidak tahu cara membangun suatu produk menjadi dikenal dan punya potensi pasar yang luas dengan pemanfaatan teknologi internet. Kondisi tersebut merupakan kesempatan yang kini dimanfaatkan oleh para penggiat teknologi yang turut serta membantu para pelaku UKM mengadaptasi layanan berbasis teknologi untuk menjalankan pemasaran secara *online*, sehingga dari hal ini bisa menciptakan ragam peluang baru yang menguntungkan.

C.9.5 Manajemen.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UKM antara lain dari sisi manajemen usaha. Manajemen yang diartikan mencapai sasaran bersama dan melalui orang lain, oleh pengusaha kecil umumnya kurang diterapkan karena semua hal dikerjakan sendiri. Dari seluruh aspek manajemen mulai proses pemasaran, produksi, SDM sampai keuangan. Karena itulah sebaiknya untuk bisa berkembang pelaku usaha kecil harus mulai

bisa mendelegasikan sebagian aspek manajemen usahanya ke pihak lain sehingga mereka bisa memikirkan ke arah pengembangan usaha. Supaya pendelegasian berjalan baik diperlukan penyusunan sistem seperti halnya yang terdapat pada usaha dengan sistem waralaba. Kalau seorang wirausaha bisa membuat sistem seperti sistem waralaba maka usaha itu sudah mulai maju, sehingga bisa mengembangkan cabangnya dengan sistem tersebut.

C.10 Bentuk Realisasi Pembinaan UKM

C.10.1 Realisasi oleh Pemerintah

1. Dinas Perindustrian

Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud.

Dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, Dinas Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi

dan terintegrasi antara pusat dan daerah.

Pertama, melalui pendekatan *top-down* dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh negara. **Kedua**, melalui pendekatan *bottom-up* dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai Industri Unggulan Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.

Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada semangat Otonomi Daerah. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan. Adapun Kebijakan yang lain dalam pengembangan IKM adalah :

1. Membantu dalam usaha perizinan serta proses adanya uji SNI (Standar Nasional Indonesia)

2. Membantu dalam pengajuan modal perbankan
3. Adanya Promosi Web
4. Penyuluhan tentang pemberdayaan industri pada setiap UKM
5. Bersinergi dengan Kementerian Perindustrian dalam adanya pameran Kementerian Perindustrian dalam tingkat nasional, daerah, bahkan tingkat internasional.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan UKM akar bambu di Kecamatan Ceper disimpulkan belum secara rutin, oleh pemerintah pusat maupun swasta. Kegiatan tersebut terkait dengan bantuan rutin pada UKM akar bambu baik berupa bimbingan, penyuluhan, pelatihan, bantuan modal, maupun bantuan peralatan. Penyuluhan dan pelatihan dilakukan oleh pemerintah dan bantuan modal serta peralatan dari swasta. Hal ini dikarenakan UKM akar bambu di Jambu Kulon mempunyai posisi yang strategis dalam perekonomian. Banyak UKM akar bambu yang ada dapat menyerap banyak tenaga kerja khususnya masyarakat lokal sehingga mengurangi angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, produk yang dihasilkan terbukti berkualitas tinggi dan juga mampu menembus pasar nasional.

Beragam produk yang beredar di pasaran merupakan hasil karya masyarakat Jambu Kulon seperti, kentongan, patung primitif, patung bebek, gasebo, kursi dan tempat tidur dan lain-lain.

Beberapa kegiatan pembinaan dan pengembangan baik dari pemerintah maupun swasta yang dilakukan pada UKM akar bambu di Jambu Kulon meliputi :

a. Bimbingan dan Penyuluhan

Kegiatan bimbingan dan penyuluhan dilakukan oleh pemerintah. Aparat dari Dinas Perindustrian Kabupaten Klaten mendatangi sentra UKM akar bambu di Jambu Kulon. Dalam hal ini, aparat Dinas Perindustrian bertemu langsung dan saling bertukar informasi mengenai masalah UKM dengan para pengusaha sehingga aparat Dinas mengetahui bagaimana perkembangan UKM akar bambu tersebut serta masalah-masalah yang ditemui oleh para pengusaha. Aparat Dinas Perindustrian akan memberikan informasi dan masukan mengenai upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan UKM.

b. Pendidikan dan Latihan

Selain berupa kegiatan bimbingan dan penyuluhan dari pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian juga diadakan kegiatan pendidikan dan

pelatihan. Kegiatan ini ditujukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pengusaha sehingga kemampuan wirausaha mereka akan meningkat.

c. Bantuan Pengembangan

Selain penyuluhan dan pelatihan, bentuk pembinaan dan pengembangan pada UKM akar bambu di Jambu Kulon, Ceper adalah melalui pemberian bantuan pengembangan. Pada umumnya, bantuan pengembangan dilakukan oleh pihak swasta, baik nasional maupun internasional.

Adapun Strategi Dinas Perindustrian dalam Pemberdayaan Sentra Industri akar bambu di Desa Jambu Kulon, Kecamatan Ceper:

- a) Strategi Peningkatan Finansial.
- b) Pengembangan Pemasaran.
- c) Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Strategi Pemberdayaan akar bambu di Jambu Kulon Kabupaten Klaten

a. Faktor Pendorong

- 1) Memanfaatkan limbah
- 2) Dukungan dari mitra dan pihak terkait

b. Faktor Penghambat

- 1)Memiliki Permasalahan dalam Permodalan

2) Pengelolaan Manajemen Yang Kurang.

3) Pembinaan dan pemberdayaan yang kurang.

2. Dinas Perdagangan dan UMKM

Dinas Perdagangan merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UKM yaitu telah dicangkannya tiga butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Pertama, adalah peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UKM, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, *multifinance*, asuransi.

Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan *entrepreneurship* bagi pelaku UKM.

Kebijakan pokok ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh.

Adapun bentuk kebijakan Dinas Perdagangan sebagai berikut;

1. Berkerja sama dengan Dinas Pariwisata Klaten dalam bentuk promosi, baik berupa pameran yang sering diadakan Dinas Pariwisata serta dibantu oleh Mbak dan Mas Kabupaten Klaten dalam promosi. Pameran tersebut antara lain :
 - a. Di Klaten sendiri sering diadakan saat hari ulang tahun Kabupaten Klaten,
 - b. Pameran tahunan nasional bekerjasama dengan BEKRAF diadakan setahun sekali di Gedung Sunan RSPD Kabupaten Klaten.
2. Membangun tempat yang disebut DEKRANASDA (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) sekaligus sebagai *showroom* bagi para pengrajin untuk memajang dan menjual produk hasil karyanya.
 - a) Mendorong pelaku IKM mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), serta memberikan pembekalan terkait perizinan dengan menghadirkan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Sehingga tidak sekedar kualitas produk yang diperhatikan tetapi juga legalitas sehingga mampu meningkatkan pada kepercayaan konsumen. Peserta diberikan materi dari pelaku usaha lainnya seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Klaten.

- b) Dinas Perdagangan bersama Diperindag Jawa Tengah memfasilitasi pelatihan website bagi IKM.

Berdasarkan beberapa pendapat dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjamin pengembangan UKM dapat disimpulkan bahwa strategi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan UKM dapat ditempuh meliputi;

1. Pemberdayaan UKM

Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat nasional yang meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; Persaingan; Prasarana; Informasi; Kemitraan; Perijinan; Perlindungan;

2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi:

- a. Produksi; memberikan bantuan seperti alat-alat dalam produksi.

- b. Pemasaran; memberikan pembinaan teknik pemasaran dan memberikan seminar tentang pembuatan website guna untuk mempromosikan produk-produk kerajinan, serta memperluas pemasaran.
- c. Sumber daya manusia; memberikan penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan untuk dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam memberikan kreatifitas dan inovasi kerajinan akar bambu.

3. Fasilitasi akses penjaminan modal.

Pemerintah membantu dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat nasional meliputi: kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, jenis pembiayaan lain.

3. Pemerintah Desa atau Kelurahan

Pemerintah Desa terkait dengan pengelolaan sentra industri akar bambu memberikan peran yang sangat penting yang langsung berdekatan dan berhubungan dalam pengelolaan sentra pengerajin akar bambu yang ada di Desa Jambu Kulon. Pemerintah Desa Jambu Kulon bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sudah memberikan beberapa kebijakan seperti:

1. Memberikan penyuluhan tentang pengelolaan industri akar bambu yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan.
2. Membentuk wadah LPER (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat) dalam pengelolaan industri akar bambu. Dalam bantuannya berupa pengadaan alat.
3. Melakukan peninjauan dan pembinaan rutin dalam waktu 3 bulan sekali.

Namun adanya beberapa kendala dalam Pemerintah Desa menangani sentra industri akar bambu seperti:

1. Sifat dari masyarakat yang acuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa. Merasa bahwa industri tersebut menggunakan modal pribadi sehingga merasa campur tangan pemerintah tidaklah penting.
2. Mementingkan kepentingan industri sendiri dan tidak mau mementingkan kepentingan industri bersama untuk dijadikan dalam suatu industri yang besar.
3. Pola masyarakat yang takut adanya persaingan antar industri yang satu dan yang lainnya.
4. Tidak aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan adanya undangan seminar, pertemuan mengenai industri akar bambu atau mengenai UMKM.

Didalam hal ini pemerintah desa perlu menindaklanjuti adanya strategi untuk dapat mengembangkan sentra industri akar bambu yang dimana industri tersebut merupakan mata pencaharian dari penduduk di Desa Jambu Kulon.

Adapun strategi dari pemerintah desa dalam upaya pengelolaan dan pemberdayaan industri akar bambu antara lain:

1. Melakukan adanya pembinaan tingkat desa, untuk merangkul sekaligus memberikan sosialisasi untuk merubah pola pikir masyarakat terkait dengan pengelolaan industri akar bambu.
2. Peninjauan secara langsung dan rutin ke tempat pengelolaan industri akar bambu.
3. Membantu masyarakat terkait dengan pengajuan dana untuk mendapatkan modal.
4. Bersama dengan Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan industri akar bambu, seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, untuk mengadakan dan aktif dalam seminar yang diadakan pemerintah serta pameran-pameran daerah maupun nasional.

C.11.1 Realisasi Organisasi Non Pemerintah

1. Kemitraan Terpadu

Proyek Kemitraan Terpadu (PKT) adalah suatu program kemitraan terpadu yang melibatkan usaha besar (inti), usaha kecil

(plasma) dengan melibatkan bank sebagai pemberi kredit dalam suatu ikatan kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepakatan. Tujuan PKT antara lain adalah untuk meningkatkan kelayakan plasma, meningkatkan keterkaitan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara inti dan plasma, serta membantu bank dalam meningkatkan kredit usaha kecil secara lebih aman dan efisien.

Dalam melakukan kemitraan hubungan kemitraan, perusahaan inti (Industri Pengolahan atau Eksportir) dan petani plasma/usaha kecil mempunyai kedudukan hukum yang setara. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan oleh perusahaan inti, dimulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis dan pemasaran hasil produksi. Proyek Kemitraan Terpadu ini merupakan kerjasama kemitraan dalam bidang usaha melibatkan tiga unsur, yaitu

- (1) Petani Kelompok Tani atau usaha kecil,
- (2) Pengusaha Besar atau eksportir, dan
- (3) Bank pemberi KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota).

2. Pembinaan oleh Perbankan

Dalam pelaksanaannya, Bank harus dapat mengatur cara pengusaha akan mencairkan kredit dan mempergunakannya untuk keperluan operasional lapangan, dan

bagaimana petani akan membayar angsuran pengembalian pokok pinjaman beserta bunganya

Adapun pola kerjasama kemitraan antara petani/kelompok tani/koperasi dengan perusahaan mitra, dapat dibuat menurut dua pola yaitu:

- a. Petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani mengadakan perjanjian kerjasama langsung kepada Perusahaan Perkebunan/ Pengolahan Eksportir. Dengan bentuk kerja sama seperti ini, pemberian kredit yang berupa KKPA kepada petani plasma dilakukan dengan kedudukan Koperasi sebagai Channeling Agent, dan pengelolaannya langsung ditangani oleh Kelompok tani. Sedangkan masalah pembinaan harus bisa diberikan oleh Perusahaan Mitra.
- b. Petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani, melalui koperasinya mengadakan perjanjian yang dibuat antara Koperasi (mewakili anggotanya) dengan perusahaan perkebunan/ pengolahan/eksportir. Dalam bentuk kerjasama seperti ini, pemberian KKPA kepada petani plasma dilakukan dengan kedudukan koperasi sebagai *Executing Agent*. Masalah pembinaan teknis budidaya tanaman/pengelolaan usaha, apabila tidak

dapat dilaksanakan oleh pihak Perusahaan Mitra, akan menjadi tanggung jawab koperasi.

3. Koperasi

Para petani/usaha kecil plasma sebagai peserta suatu PKT, sebaiknya menjadi anggota suatu koperasi primer di tempatnya. Koperasi bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu plasma di dalam pembangunan kebun/usaha sesuai keperluannya. Fasilitas KKPA hanya bisa diperoleh melalui keanggotaan koperasi. Koperasi yang mengusahakan KKPA harus sudah berbadan hukum dan memiliki kemampuan serta fasilitas yang cukup baik untuk keperluan pengelolaan administrasi pinjaman KKPA para anggotanya. Jika menggunakan skim Kredit Usaha Kecil (KUK), kehadiran koperasi primer tidak merupakan keharusan

D. PENUTUP

D.1 Kesimpulan

Desa Jambu Kulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten adalah sentra industri akar bambu, dimana pengelolaan dari sentra industri tersebut adalah individu atau warisan turun temurun dari keluarga. Sentra industri tersebut adalah potensi daerah yang dapat diunggulkan dalam bidang ekonomi karena keberadaan UKM ini mampu menyerap

banyak tenaga kerja yang berarti mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Maka dibutuhkanlah peran dari pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan sentra industri akar bambu tersebut, antara lain:

1. Dinas Perindustrian.

1. Membantu pengembangan usaha kecil melalui pemberian modal sementara.
2. Meningkatkan akses pemasaran dengan bantuan promosi web, informasi pasar, dan membantu dalam menjalin kerjasama dengan pihak terkait.
3. Memerikan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan serta seminar.

2. Dinas Perdagangan

1. Membantu pemberdayaan UKM yang meliputi pemenuhan kebutuhan dana, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan, dan perlindungan.
2. Melakukan adanya pembinaan pengembangan yang meliputi
 - a. Bantuan alat produksi
 - b. Seminar pembuatan web.
3. Membantu penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat nasional, yang meliputi: kredit perbankan, pinjaman lembaga bukan bank dan lain-lain.

3. Pemerintah Desa

1. Melakukan adanya pembinaan tingkat desa, untuk merangkul sekaligus memberikan sosialisasi untuk merubah pola pikir masyarakat terkait dengan pengelolaan industri akar bambu.
2. Peninjauan secara langsung dan rutin ke tempat pengelolaan industri akar bambu.
3. Membantu masyarakat terkait dengan pengajuan dana untuk mendapatkan modal.
4. Bersama dengan Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan industri akar bambu, seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, untuk mengadakan dan aktif dalam seminar yang diadakan pemerintah serta pameran-pameran daerah maupun nasional.

D.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas di atas, penulis memberikan saran sebagai sumbangsih pemikiran terhadap kesempurnaan pelaksanaan kegiatan peengelolaan dan pengembangan UKM sebagai berikut:

1. Perlunya pembinaan yang rutin dari pemerintah desa dan juga pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan dan pembinaan UKM.

2. Perlunya pelatihan guna untuk meningkatkan kualitas kerja para pengrajin, dengan berbagai pihak terutama dalam hal pembuatan produk dan pemasaran.
3. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah desa dan daerah dengan mitra yang terkait seperti koperasi, atau perbankan guna untuk membantu dalam permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2015. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Fandeli, Chafid. "Potensi Obyek Wisata Alam Indonesia" Dalam: Fandeli.
- Chafid (Ed) 2001. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty
- Hadilinatih, B; S Widjajani, 2016; "Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)" *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship* 6 (1), 77-87
- Huberman, Michael dan Miles, B. Matthew. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Musanef, 1995. *Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung
- Pitana, I Gde dan Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Rahman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Rangkuti, Freddy. 2004. *Analisis SWOT Teknik membedah kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia
- Setiawan, Achma Hendra., 2004. *Fleksibilitas Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, Dinamika Pembangunan Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Sitamorang, Victor, M. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunaryo, Bambang, 'Strategi Pemasaran Pariwisata,' dalam Fandeli, Chafid (Ed) 2001. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara

UNDANG - UNDANG

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional 2000

UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

Peraturan Presiden No 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

WEBSITE

Hanif. 2012. *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia (Online)*,

(<https://www.scribd.com/doc/102335452/Usaha-Mikro-Kecil-dan-Menengah-UMKMdi-Indonesia>, diakses 25 Oktober 2018).

Lentera. 2012. *Kelemahan dan Hambatan Koperasi dan UKM (Online)*,

(<https://lembagalentera.wordpress.com/2012/12/11/kelemahan-dan-hambatan-koperasidan-ukm-2/>, diakses 25 Oktober 2018).

Purwasih. 2013. *Perkembangan Koperasi dan UKM di Indonesia (Online)*,

(<https://www.kompasiana.com/ratripurwasih/5520e43ea33311614a46cdb1/perkembangan-koperasi-dan-ukm-di-indonesia>, diakses 24 Oktober 2018).

Sikumbang. 2014. *Jumlah Koperasi dan UMKM Terus Meningkat (Online)*,

(<https://www.antaraneews.com/berita/416949/menkop-jumlahkoperasi-dan-umkmterus-meningkat>, diakses 26 Oktober 2018).

Sudaryanto. 2014. *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN(Online)*,

(<http://www.fiskal.kemenukeu.go.id/dwkontenview.asp?id=20140926144720682081326>, diakses 27 April 2018).

Sumetra. 2013. *Jumlah UKM di Indonesia Capai 55,2 Juta (Online)*,

(<http://nasional.inilah.com/read/detail/2026676/jumlah-ukm-diindonesia-capai-552juta#.VCokzVc5UuI>, diakses 28 Oktober 2018).

(<https://klatenkab.go.id/2014>, diakses 10 oktober 2018)

(<http://lhalhaa.blogspot.com/2013/04/permasalahan-yang-dihadapiukm.html>

(diakses 10 Oktober 2018, pukul 11.00 WIB)

(<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/kebijakan-pemerintah-terhadap-ukm.html> (diakses 12 Oktober 2018, pukul 12.17)